ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

LITERATURE REVIEW: AKUNTABILTAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE DI SEKTOR PUBLIK

Yuniati[1], Armansyah[2], Muhammad Ramzy Agil Faried[3], Nikita Mutia Putri[4]
Universitas Muhammadiyah Bandung[1,2,4]
Universitas Insan Cendekia[2]
yuniati@umbandung.ac.id, muhammadr4mzy@gmail.com, nikiitamutia@gmail.com,

INFORMASI ARTIKEL
Diterima : 04/05/2026
Direvisi : 15/05/2026
Disetujui: 21/05/2026

Kata Kunci :
Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan, Good Governance, Sektor Publik

Keywords:
Accountability, Transparency, Financial Management, Good Governance, Public Sector

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sebagai pilar utama dalam mewujudkan good governance di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari 20 artikel ilmiah nasional yang diterbitkan pada periode 2020–2025 dan diperoleh melalui penelusuran Google Scholar serta aplikasi Publish or Perish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sektor publik, memperkuat kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mampu meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa maupun organisasi sektor publik lainnya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, dan terbatasnya akses informasi bagi masyarakat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan good governance yang berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan keterbukaan informasi, serta optimalisasi sistem pengawasan untuk mendukung pengelolaan keuangan sektor publik yang lebih akuntabel dan transparan.

This study aims to analyze the role of accountability and transparency in financial management as key pillars in realizing good governance in the public sector. The research method used is a literature review utilizing secondary data sourced from 20 national scientific articles published in the 2020–2025 period and obtained through Google Scholar searches and the Publish or Perish application. The results of the study indicate that accountability and transparency play a significant role in increasing the effectiveness and efficiency of public sector financial management, strengthening the quality and credibility of financial reports, encouraging public participation in oversight, and increasing public trust in the government. In addition, these two principles function as control mechanisms capable of minimizing irregularities in the financial

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

management of villages and other public sector organizations. However, their implementation still faces various obstacles, such as limited human resources, weak internal control systems, low utilization of information technology, and limited access to information for the public. The conclusion of this study shows that accountability and transparency are important foundations in realizing sustainable good governance, thus requiring strengthening the capacity of the apparatus, increasing information disclosure, and optimizing the oversight system to support more accountable and transparent public sector financial management.

PENDAHULUAN

Good governance menjadi isu penting dalam penyelenggaraan sektor publik seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sektor publik menempati posisi strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Amalia et al., 2020; Masdianah et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas dan transparansi hadir sebagai prinsip mendasar yang membentuk kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Akuntabilitas menekankan adanya kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam setiap penggunaan anggaran, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses pengelolaan keuangan. Penerapan kedua prinsip ini secara berkelanjutan terbukti mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong terwujudnya good governance, khususnya pada level pemerintahan desa (Temalagi & Silooy, 2022; Widuri et al., 2022).

Dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik, akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan yang disusun secara jelas dan terbuka. Keterbukaan laporan keuangan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, sementara akuntabilitas aparatur mendorong penggunaan anggaran yang lebih terarah, efektif, dan efisien. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berpengaruh positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan serta tingkat kepercayaan masyarakat (Riyanto et al., 2021; Fatimah & Riharjo, 2021). Meskipun secara normatif prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya di sektor publik masih menghadapi beragam kendala. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kedua prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan sistem pendukung yang tersedia (Indriasih et al., 2022; Nurindah & Sari, 2023).

Penerapan akuntabilitas dan transparansi juga berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mampu meningkatkan kredibilitas pemerintah serta memperkuat fungsi pengawasan publik. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kedua prinsip ini berperan penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan sekaligus mendukung terwujudnya good governance (Ibrahim et al., 2024; Uma, 2024).

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi relevan untuk dianalisis secara lebih mendalam. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kedua prinsip tersebut sebagai pilar utama dalam mewujudkan good governance, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia (Astuti et al., 2021; Noviana & Haryanto, 2023).

LANDASAN TEORI

Good Governance dalam Sektor Publik

Good governance dapat dipahami sebagai kerangka tata kelola pemerintahan yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sektor publik, konsep ini berfungsi sebagai arah bagi pemerintah agar pengelolaan sumber daya publik tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan publik (Astuti et al., 2021; Masdianah et al., 2024). Pengelolaan keuangan publik merupakan bagian sentral dalam upaya mewujudkan good governance karena mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan berpotensi menimbulkan inefisiensi serta membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan good governance tidak dapat dilepaskan dari keberadaan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan sektor publik, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun desa (Amalia et al., 2020; Riyanto et al., 2021).

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas dalam sektor publik merujuk pada kewajiban pemerintah dan aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, program, serta penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan peran, sistem pelaporan yang terstruktur, serta evaluasi kinerja yang dapat diukur secara objektif. Dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi sektor publik dan dapat diperiksa melalui mekanisme audit (Riyanto et al., 2021). Penerapan akuntabilitas yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Ketika proses pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Kondisi ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan mendorong terwujudnya good governance, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan keuangan daerah (Yanti et al., 2023; Radeana et al., 2024).

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik, transparansi mencakup keterbukaan informasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

publik dikelola dan digunakan, sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan publik secara tidak langsung (Yuliarti & Oktavian, 2021). Penerapan transparansi yang optimal berperan penting dalam mendukung akuntabilitas serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Informasi keuangan yang disampaikan secara jelas dan terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah dan desa (Fitriana, 2021; Nurindah & Sari, 2023).

Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Good Governance

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan good governance. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sinergi antara kedua prinsip ini membentuk sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik (Temalagi & Silooy, 2022). Penerapan akuntabilitas dan transparansi secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta kinerja keuangan sektor publik. Ketika pemerintah mampu menjalankan kedua prinsip tersebut secara seimbang, risiko penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan good governance yang berkelanjutan (Uma, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara manual menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan *Google Scholar*. Pencarian artikel dilakukan pada beberapa basis data akademik dengan menggunakan kata kunci antara lain "*akuntabilitas pengelolaan keuangan*", "*transparansi pengelolaan keuangan*", "*pengelolaan keuangan sektor publik",* serta *"good governance sektor publik*". Artikel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu periode (2020-2025). Artikel yang dipilih mencakup penelitian dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dan difokuskan pada kajian pengelolaan keuangan sektor publik serta keterkaitannya dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance.

Bagian 1 *Alur pencarian dan pemilihan artikel*

Google Scholar (n = 150)

Penyaringan judul, relevansi abstrak, tahun publikasi dan akreditasi jurnal (n = 66)

Artikel full text sesuai kriteria (n = 43)

Artikel sesuai dengan kriteria penilaian (n = 20)

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Tabel 1.
Daftar Artikel yang Digunakan dalam Literature Review

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Temalagi & Silooy (2020)	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh nyata terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat terbukti memperkuat penerapan prinsip good governance pada tingkat desa.
2	Astuti et al. (2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil kajian memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi keuangan serta pertanggungjawaban pemerintah desa berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kepercayaan masyarakat.
3	Riyanto et al. (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa	Studi ini menelaah mekanisme pertanggungjawaban alokasi dana desa melalui laporan keuangan dan pengawasan. Temuannya menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan mampu memperkuat akuntabilitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4	Amalia et al. (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa dianalisis berdasarkan prinsip akuntansi sektor publik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai alat pengendalian untuk menekan penyimpangan serta meningkatkan mutu pengelolaan keuangan desa.
5	Ngakil & Kaukab (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian ini menyoroti keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya transparansi berdampak pada melemahnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
6	Fatimah & Riharjo (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan	Praktik akuntabilitas dan transparansi dikaji dalam seluruh tahapan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

No	Penulis	Judul	Hasil
		Desa	pengelolaan keuangan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses mampu memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa.
7	Budiarti & Retnani (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan ADD	Pengelolaan alokasi dana desa ditinjau berdasarkan prinsip good governance. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
8	Yuliarti & Oktavian (2021)	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes	Transparansi laporan keuangan dan aset BUMDes dikaji sebagai bagian dari pengelolaan keuangan publik desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas pengelola BUMDes kepada masyarakat.
9	Fitriana (2021)	Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes	Pengelolaan keuangan BUMDes dianalisis dalam perspektif good corporate governance. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat desa terhadap BUMDes.
10	Widuri et al. (2022)	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa	Hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dianalisis secara simultan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut saling mendukung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
11	Nurindah & Sari (2023)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi	Penelitian ini mengkaji tantangan pengelolaan dana desa pada masa pandemi melalui aspek pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

No	Penulis	Judul	Hasil
			tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik meskipun dalam kondisi krisis.
12	Yanti et al. (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban pemerintah desa. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan transparansi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.
13	Radeana et al. (2024)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan OPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kinerja keuangan OPD melalui pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan terukur.
14	Masdianah et al. (2024)	Transparansi, Akuntabilitas dan Value for Money dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik	Pengelolaan keuangan sektor publik dikaji dengan pendekatan value for money. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mendukung tercapainya efisiensi, efektivitas, serta optimalisasi penggunaan anggaran publik.
15	Uma (2024)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa	Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja keuangan pemerintah desa dianalisis melalui laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
16	Febrianti et al. (2024)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes	Pengelolaan APBDes ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua prinsip tersebut mendukung terwujudnya good governance di tingkat desa.
17	Ibrahim et al. (2024)	Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa	Kualitas laporan keuangan desa dianalisis berdasarkan penerapan transparansi dan akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

No	Penulis	Judul	Hasil
			bahwa kedua prinsip tersebut meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan desa.
18	Pratiwi & Nuraisyiah (2024)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan keuangan desa dikaji melalui aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban aparatur desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memperkuat pengawasan publik terhadap keuangan desa.
19	Indriasih et al. (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian ini menganalisis peran pengendalian internal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memperkuat tata kelola keuangan desa.
20	Noviana & Haryanto (2023)	Akuntabilitas, Transparansi dan SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memperkuat penerapan prinsip good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik berjalan secara bertanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal pemerintah, tetapi juga mencerminkan keseriusan aparatur dalam mengelola dana publik secara tepat. Dalam praktiknya, akuntabilitas terlihat dari adanya prosedur yang jelas dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, serta mekanisme evaluasi kinerja yang terukur. Melalui penerapan tersebut, pemerintah dapat menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana memiliki dasar yang jelas dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan (Riyanto et al., 2021). Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya akuntabilitas sering kali menjadi pemicu terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Sebaliknya, ketika akuntabilitas diperkuat, disiplin anggaran meningkat dan sistem pengendalian internal menjadi lebih efektif. Dampaknya terlihat pada perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dan desa, sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Yanti et al., 2023; Radeana et al., 2024).

Peran Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Transparansi berperan sebagai sarana untuk membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Keterbukaan ini memungkinkan publik memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan dimanfaatkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat berperan sebagai pihak yang mengawasi kinerja pemerintah (Yuliarti & Oktavian, 2021). Berbagai kajian menunjukkan bahwa transparansi yang memadai mampu menekan peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ketika informasi keuangan disajikan secara jelas dan mudah diakses, aparatur pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain itu, keterbukaan informasi turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan (Fitriana, 2021; Nurindah & Sari, 2023).

Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Pilar Good Governance

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam membangun good governance. Akuntabilitas tanpa transparansi berpotensi menciptakan ruang tertutup bagi publik, sedangkan transparansi tanpa akuntabilitas dapat melemahkan makna pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut perlu diterapkan secara bersamaan agar pengelolaan keuangan sektor publik dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Temalagi & Silooy, 2022; Masdianah et al., 2024). Penerapan yang konsisten terhadap kedua prinsip ini terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah yang akuntabel dan transparan umumnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik serta mampu mengelola anggaran secara lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan kebutuhan praktis dalam mewujudkan good governance yang berkelanjutan (Uma, 2024).

Tantangan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Sektor Publik

Walaupun prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diatur dalam berbagai regulasi, penerapannya di sektor publik masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya sistem pengawasan sering kali menghambat implementasi kedua prinsip tersebut secara optimal. Akibatnya, informasi keuangan belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat secara akurat dan tepat waktu (Amalia et al., 2020). Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik juga masih relatif rendah. Padahal, keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperluas keterbukaan informasi agar tujuan good governance dapat tercapai secara maksimal (Ngakil & Kaukab, 2020).

KESIMPULAN

Bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik serta mewujudkan good governance. Penerapan kedua prinsip tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, memperkuat kualitas serta kredibilitas laporan keuangan,

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa maupun sektor publik lainnya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mengoptimalkan sistem pengawasan agar pengelolaan keuangan sektor publik dapat berjalan secara lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Z., Malikah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Sesuai dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik. E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8477

Astuti, P., Widayanti, R., & dkk. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo Kabupaten Boyolali. Maksipreneur: Jurnal Manajemen, Koperasi dan Entrepreneurship. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur/article/view/628

Febrianti, A. M., Masnawaty, S., & Afiah, N. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Sains Riset.

Fitriana, N. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) dalam Perspektif Good Corporate Governance. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4310/

Ibrahim, G., Blongkod, H., & Rasjid, H. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). SEIKO: Journal of Management & Business.

Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis. https://pdfs.semanticscholar.org/bfc3/8828c03a83b3c2d1733cd3974bfa51e5e12f.pdf

Masdianah, M., Wonar, K., & dkk. (2024). Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for Money terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Cakrawala Repositori IMWI. http://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/687

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology. https://www.academia.edu/download/78294416/796.pdf

Noviana, K. Y., & Haryanto, H. (2023). Akuntabilitas, Transparansi, dan Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa demi Mewujudkan Good Governance. Diponegoro Journal of Accounting. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41627

Nurindah, M. W. A., & Sari, N. R. (2023). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19. Journal of Taxation and Accounting.

https://pdfs.semanticscholar.org/8cb7/c12df812dedeb9ca4cafff8ef68d50413f44.pdf

Pratiwi, L., & Nuraisyiah, N. (2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Sains Riset.

Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & dkk. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12579/

Riyanto, L. A., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Respon Publik. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/9929

Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Accounting Research Unit (ARU) Journal. https://pdfs.semanticscholar.org/a351/d5ce2f4b21380bd9955cba56466116f445a9.pdf

Uma, N. U. M. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Fenomenologi di Desa Anakalang Kabupaten Sumba Tengah). Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis. https://prin.or.id/index.php/cemerlang/article/view/2778

Widuri, S., Tohari, A., & Zaman, B. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/2305

Yanti, E. R., Wiralestari, W., & dkk. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Manajemen dan Keuangan. https://mail.online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/20371

Yuliarti, N. C., & Oktavian, D. D. (2021). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Karya Mandiri pada Pelaporan Aset Desa. UMMagelang Conference Series. https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5841